

## **PENGEMBANGAN ELECTRONIC GOVERNMENT DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG: PERAN DAN KESIAPANNYA**

Oleh: Dra. Edah Jubaedah, MA \*)

*Electronic government merupakan suatu konsep yang dikembangkan sebagai upaya untuk mereformasi dan menstransformasi bidang pemerintahan, dengan memanfaatkan perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Konsep tersebut berkembang dilatarbelakangi oleh dua hal yakni pertama, kondisi pemerintahan di berbagai negara yang masih dipandang belum optimal di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama di dalam bidang pelayanan kepada masyarakat; kedua, kemajuan pesat bidang teknologi dan informasi yang memberikan berbagai kemungkinan dan kemudahan bagi organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.*

*Penerapan E-government pada dasarnya meliputi tiga aspek yakni otomatisasi, informatisasi dan transformation. Ketiga aspek tersebut merupakan upaya untuk menciptakan empat bentuk penerapan e-government yaitu e-administration, eservice, e-citizen dan e-society. Di negara-negara berkembang penerapan e-government masih menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan. Oleh karena itu pemerintah negara-negara berkembang perlu mempersiapkan diri secara matang apabila ingin menerapkan konsep e-government tersebut. Kesiapan tersebut antara lain adanya kebijakan dan komitmen pemerintah, sarana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, iklim yang mendukung e-government serta kemudahan akses masyarakat terhadap sarana teknologi informasi dan komunikasi seperti internet. Karena kegagalan penerapan e-government akan merupakan suatu pemborosan yang cukup mahal.*

### **Pendahuluan**

*Electronic government* atau disebut juga *e-government* atau *e-govt* atau diindonesiakan menjadi pemerintahan secara elektronik merupakan suatu fenomena relatif baru yang muncul sebagai bagian dari upaya untuk mereformasi bidang pemerintahan. Fenomena tersebut muncul di negara-negara maju sebagai dampak dari perkembangan pesat bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pada awal tahun 1990-an, di Amerika timbul perdebatan tentang sejauh mana implikasi

perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi tersebut terhadap bidang pemerintahan. Perdebatan tersebut dalam situs World Bank disebut dengan debat "Information Superhighways". Perdebatan tersebut kemudian melebar ke arah perwujudan "information society" dan e-government merupakan salah satu aspek untuk mewujudkan masyarakat informasi tersebut.

Konsep e-government berkembang dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, kondisi pemerintahan di berbagai negara,

\* Dosen pada STIA LAN Bandung

termasuk negara maju sekalipun, yang masih dipandang sebagai organisasi yang tidak efisien dan tidak efektif, sehingga perlu ditransformasi. Kedua teknologi informasi dan komunikasi memiliki potensi yang cukup besar untuk menstransformasi pemerintahan dalam rangka menghasilkan kinerja pemerintahan yang lebih baik lagi. Oleh karena itulah World Bank menegaskan bahwa e-government merupakan suatu cara untuk menstransformasi pemerintahan agar lebih berpusat kepada masyarakat (citizen-centered), adapun teknologi hanyalah merupakan alat untuk melakukan transformasi tersebut.

Oleh karena itulah kemudian khususnya di negara-negara maju inisiatif untuk melakukan transformasi di bidang pemerintahannya dengan menerapkan konsep e-government. Termasuk negara-negara berkembang yang kinerja pemerintahannya lebih buruk dari pada negara-negara maju, ikut berinisiatif untuk menerapkan konsep tersebut. Tidak terkecuali dengan Indonesia, telah muncul ide untuk mewujudkan pemerintahan secara elektronis tersebut. Bahkan beberapa pemerintah baik tingkat propinsi, kabupaten maupun kota telah memulai untuk mengembangkan dan menerapkannya. Penelitian yang dilakukan oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi memperlihatkan dari sekitar 390 instansi pemerintah tingkat propinsi, kabupaten maupun kota, terdapat 99 instansi yang telah mengembangkan websitenya (Kristiadi, 2002). Bahkan ada pemerintahan tingkat kabupaten yang sudah menerapkan pelayanan secara on-line.

Pertanyaannya adalah, benarkah Indonesia sudah siap menerapkan konsep e-government? Pertanyaan ini muncul

mengingat bahwa menurut World Bank, teknologi informasi dan komunikasi memang dapat memberikan berbagai manfaat bagi pemerintah dan masyarakat suatu negara (2002). Tapi perlu diingat bahwa e-government bukan merupakan jalan pintas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk menghemat anggaran negara atau untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan bersih. Penerapan konsep e-government apabila tidak didukung oleh kesiapan yang matang dan menyeluruh, bahkan akan menjadi suatu hal yang beresiko dan bahkan merupakan suatu pemborosan. Terlebih lagi bagi Indonesia, yang menurut kajian The Economist Intelligence Unit bekerja sama dengan perusahaan IBM, yang mengkaji kesiapan e-business di 60 negara maju dan berkembang pada tahun 2002, menempatkan Indonesia dalam peringkat ke-54 dan dan peringkat ke 14 di antara 16 negara-negara di Asia Pasifik yang dikaji.

Oleh karena itulah kiranya ide atau pemikiran kita untuk dapat segera menerapkan atau mewujudkan e-government perlu dikaji secara hati-hati dan dipersiapkan dengan matang. Tulisan ini mencoba untuk menguraikan konsep e-government dari berbagai literatur, serta mencoba melihat hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah kita untuk dapat mewujudkan konsep e-government. Sehingga kita tidak begitu saja latah mengikuti perkembangan kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi, tanpa melihat sisi kesiapan dan kebutuhan kita yang sesungguhnya.

### *Pengertian E-government*

Konsep e-government sebagaimana yang telah disinggung dalam pendahuluan merupakan suatu konsep yang relatif baru,

terutama di Indonesia. Beberapa rumusan pengertian konsep ini banyak menekankan kepada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan kinerja. Sebenarnya apabila pengertiannya hanya sekedar pada penggunaan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan, maka konsep ini barangkali bukan merupakan suatu hal yang baru dalam bidang pemerintahan. Karena negara-negara berkembang termasuk di Indonesia, barangkali sudah cukup lama mengadopsi teknologi informasi di dalam membantu kegiatan di bidang pemerintahan. Bahkan menurut Heeks (2001), pemerintah negara-negara berkembang sudah menggunakan teknologi informasi kurang lebih 40 tahun-an. Jadi apanya yang baru dari konsep e-government tersebut?

Heeks (2001) menyebutkan dua karakteristik yang mencirikan perkembangan e-government. Pertama bahwa sekarang ini kita telah beranjak dari teknologi informasi (*Information Technology/IT*) ke arah teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technologies/ITCs*). Kedua adalah orientasi pendekatan dari teknologi informasi (IT) ke arah sistem informasi (*information systems*).

Menurut Heeks (2001) dengan adanya internet, pemerintah dapat menciptakan lima bentuk "*new digital connections*" (keterhubungan digital), yakni:

- *Connections within government*, yang memungkinkan integrasi pemikiran antar pemerintah
- *Connections between government and NGOs/citizens*, yang dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah
- *Connections between government and business/citizens*, yang memungkinkan

adanya transformasi sistem pemberian pelayanan

- *Connections within and between NGOs*, yang mendukung terjadinya proses pembelajaran dan tindakan bersama
- *Connections within and between communities*, yang dapat mengembangkan pembangunan sosial dan ekonomi

Sama halnya dengan pendapat Heeks, beberapa rumusan tentang konsep e-government sangat menekankan pada adopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Misalnya saja Conrad (dalam SANKRI, LAN:2002) menyebutkan bahwa e-government merupakan suatu pemerintahan yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanannya. Begitu pula Worl Bank memberikan batasan pengertian e-government sebagai "... *the use of information and communication technologies to improve the efficiency, effectiveness, transparency and accountability of government* (dalam SANKRI, LAN: 2002).

Sprecher (dalam Moon, 2002) memberikan dua pengertian dari konsep ini, yakni e-government dalam pengertian sempit dan pengertian luas. Secara sempit e-government dapat diartikan sebagai produksi dan pemberian pelayanan pemerintah melalui aplikasi teknologi informasi, sedangkan secara luas e-government berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi untuk lebih menyederhanakan dan meningkatkan transaksi antara pemerintah dengan aktor lainnya seperti masyarakat, kalangan bisnis ataupun lembaga pemerintah lainnya.

Sementara itu PBB dan The American Society for Public Administration (ASPA) yang melakukan studi dengan tajuk The

Global Study of E-Government merumuskan pengertian yang cukup luas tentang *e-government*. Adapun kutipan lengkap pengertian *e-government* menurut dua lembaga internasional tersebut adalah sebagai berikut:

*"E-government includes the use of all information and communication technologies, from fax machine to wireless palm pilots, to facilitate the daily administration of government. However, like e-commerce, the popular interpretation of e-government is one that defines it exclusively as an internet driven activity ... to which it may be added that improves citizens access to government information, services and expertise to ensure citizen participation in, and satisfaction with government process ... it is a permanent commitment by government to improving the relationship between the private citizens and the public sector through enhanced, cost-effective and efficiency delivery of services, information and knowledge. It is the practical realization of the best that government has to offer (UN dan ASPA, 2001, dalam Moon, 2002).*

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa *e-government* pada umumnya diinterpretasikan sebagai aktivitas harian yang berbasis internet, yang dikembangkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, pelayanan dan pengetahuan sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dan puas terhadap proses pemerintahan. Ditambahkan bahwa hal tersebut merupakan komitmen yang permanen dari pemerintah untuk meningkatkan hubungan antara masyarakat dengan sektor publik.

Sedangkan Lembaga Administrasi Negara dalam buku Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI, 2003) mendefinisikan *e-*

government sebagai "penggunaan teknologi berdasarkan web (jaringan), komunikasi internet dan dalam beberapa kasus merupakan interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas akses ke dan dari pemberian layanan dan informasi pemerintah kepada penduduk, dunia usaha, pencari kerja, dan pemerintah lain, baik internasional maupun antar negara (hal. 444).

#### **Peran dan Ruang Lingkup E-government**

Sebagaimana telah disinggung bahwa di berbagai negara terutama di negara-negara berkembang menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahnya. Berbagai label negatif melekat pada pemerintah, antara lain tidak efisien, tidak efektif, tidak akuntabel, korup, tidak tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan lingkungan strategisnya, dan seabreg ungkapan negatif lainnya. Oleh karena itulah negara-negara berkembang berupaya untuk melakukan berbagai upaya pembenahan atau reformasi untuk menciptakan suatu "good governance". Salah satu yang diharapkan adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui konsep *e-government*. Diharapkan dengan upaya tersebut dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya, menciptakan hubungan sinergis di antara pemerintah dengan stakeholdernya dan membangun interaksi dengan dan di dalam masyarakat.

Paling tidak ada 3 hal yang dapat diberikan oleh teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan. Pertama, teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari fungsi para penyelenggara negara, termasuk di dalamnya pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Keedua, teknologi informasi dan komunikasi membuka berbagai kemungkinan bagi pemerintah untuk lebih transparan atau terbuka kepada masyarakat dan dunia bisnis dengan memberikan akses yang semakin luas terhadap informasi yang dikumpulkan dan dihasilkan oleh pemerintah. Ketiga, adaptasi terhadap teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan untuk terjadinya perubahan mendasar dalam hubungan antara masyarakat dengan negara dan antara negara.

Sementara itu Heeks (2001) menyebutkan tiga potensi perubahan yang ditawarkan teknologi informasi dan komunikasi yakni sebagai berikut:

- *Automatisation*, yakni mengganti tenaga manusia yang ada sekarang dalam proses yang meliputi pekerjaan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, pengeluaran atau pengiriman informasi, misalnya otomatisasi fungsi pekerjaan klerikal.
  - *Informatisation*, mendukung tenaga manusia yang ada sekarang dalam memproses informasi, misalnya mendukung proses pengambilan keputusan, komunikasi dan implementasi keputusan.
  - *Transformation*, yakni menciptakan proses pengolahan informasi yang baru, misalnya menciptakan metode baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Dengan kata lain dengan menerapkan e-government pemerintah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Memberikan pelayanan yang lebih murah, karena dapat menghasilkan keluaran (output) yang sama dengan total biaya yang lebih rendah.

- Melakukan lebih banyak, dalam arti menghasilkan lebih banyak output dengan total biaya yang sama.
- Melayani lebih cepat, dalam arti menghasilkan output yang sama dengan biaya yang sama tapi dengan waktu yang lebih sedikit.
- Bekerja lebih baik dengan menghasilkan output yang standar kualitas yang lebih tinggi
- Lebih inovatif dengan menghasilkan keluaran-keluaran yang baru.

Adapun ruang lingkup dari konsep e-government menurut Ntiro (2000, dalam Heeks: 2001) meliputi tiga aspek sebagai berikut:

- *e-administration*, untuk meningkatkan proses pemerintahan
- *e-citizens* dan *e-service*, untuk menghubungkan masyarakat
- *e-society*, untuk membangun interaksi dengan dan antara masyarakat

Adapun yang dimaksud dengan e-Administration adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kegiatan internal pemerintahan. Dengan penerapan e-Administration pemerintah dapat melakukan peningkatan dalam hal pengurangan anggaran belanja, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya organisasi, meningkatkan kapasitas untuk mengkaji, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi serta kebijakan yang diambil, dan menciptakan pemberdayaan dengan medesentralisasikan kekuasaan, kewenangan dan sumber daya kepada tingkat yang lebih rendah.

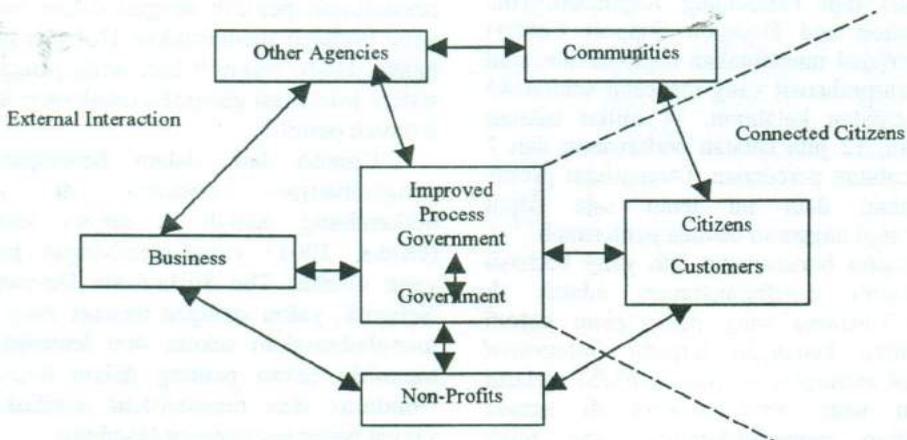
Sedangkan yang dimaksud dengan *e-citizens* dan *e-services* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

Penerapan e-citizens dan e-services ini merupakan upaya untuk menyebarluaskan informasi dari pemerintah kepada masyarakat, untuk menjangkau aspirasi dari masyarakat sehingga masyarakat lebih terlibat dalam pembangunan, dan meningkatkan kualitas, kenyamanan serta menurunkan biaya pelayanan kepada masyarakat. Penerapan e-citizens dan e-services ini sangat menuntut adanya saling keterhubungan sebagaimana yang dimungkinkan dengan mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan e-citizens dan e-services dapat dilakukan melalui tiga tahapan (Heeks, 2001), yakni tahapan diseminasi, tahapan interaksi dan terakhir tahapan transaksi.

Sedangkan lingkup yang terakhir dari e-government adalah e-society yang menyangkut penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan hubungan

baik antara lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah lainnya, organisasi swasta, organisasi nir-laba atau organisasi kemasyarakatan, maupun hubungan antara berbagai lembaga di dalam masyarakat. Penerapan e-society tidak hanya diharapkan dalam meningkatkan proses internal dalam pemerintahan, tapi juga diharapkan dapat meningkatkan interaksi antara pemerintah dengan kalangan dunia usaha, membangun kapasitas sosial, ekonomi dan pendapatan masyarakat serta memperkuat hubungan antar-lembaga. Sama halnya dengan e-citizens dan e-services, penerapan e-society pun sangat menuntut adanya saling keterhubungan yang mungkin disediakan oleh teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu penerapan e-citizens, e-services dan e-society merupakan ruang lingkup yang relatif masih baru dalam e-government.

Ntiro lebih jelas lagi menggambarkan bagan ruang lingkup e-government sebagai berikut:



Gambar: E-government Domain (Ntiro, 2000, dalam Heeks, 2001)

### ***Penerapan E-government Bagi Negara-negara Berkembang***

Beberapa negara berkembang telah mulai menerapkan konsep e-government baik dalam dalam lingkup e-Administration, e-citizens, e-services maupun e-society. Bahkan ada beberapa yang dapat dikatakan berhasil. Namun demikian menurut Heeks (2001) penerapan e-government di negara-negara berkembang masih menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan. Misalnya saja penerapan e-Administration di negara-negara berkembang pada umumnya baru pada tahap otomatisasi pekerjaan-pekerjaan administratif. Atau penerapan e-citizens dan e-services, pada umumnya masih pada tahapan diseminasi atau pemberian informasi dari pemerintah kepada masyarakat, belum menyentuh tahapan interaksi dan transaksi.

Namun demikian ada beberapa negara berkembang yang berhasil menerapkan konsep e-government tersebut. Misalnya saja di Mesir lembaga yang bernama Pusat Informasi dan Pendukung Keputusan (the Information and Decision Support Center) telah berhasil menciptakan database nasional yang komprehensif yang mencatat sekitar 85 miliar catatan kelahiran, 34 miliar catatan kematian, 12 juta catatan perkawinan dan 2 miliar catatan perceraian. Otomatisasi proses pengolahan data ini tentu saja dapat mengurangi anggaran belanja pemerintah.

Negara berkembang lain yang berhasil menerapkan e-Administration adalah di negara Tanzania yang menerapkan sistem manajemen keuangan terpadu (*integrated financial management system/IFMS*) melalui jaringan *wide area network* di semua kementerian pemerintahannya yang telah meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran belanja organisasi pemerintah.

Contoh keberhasilan negara berkembang dalam menerapkan e-citizens adalah negara Afrika Selatan yang berhasil memperoleh penghargaan "the 2000 Computerworld Smithsonian Award" untuk kategori program terbaik dalam organisasi pemerintahan dan organisasi nir-laba. Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemilihan umum tahun 1994, Komisi Independen Pemilihan Umum (Independent Electoral Commission/IEC) Afrika Selatan diberi tugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang kedua pada tahun 1999 berlangsung secara demokratis, bebas dan jujur. Pemilihan umum ini sangat penting untuk menjaga kestabilan politik di negara Afrika Selatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam waktu yang cukup singkat berhasil menerapkan teknologi informasi yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Pemilu di Afrika Selatan. Upaya yang dilakukan antara lain pengembangan *wide area network* yang berbasis teknologi satelit, pendaftaran pemilih dengan sistem bar-code yang berhasil memasukkan 18,4 juta pemilih hanya dalam waktu 9 hari, serta penggunaan sistem informasi geografis untuk menciptakan wilayah pemilih.

Contoh lain dalam penerapan dan pengembangan e-society di negara berkembang adalah di negara Honduras (Heeks, 2001) yang membangun jaringan yang disebut The Sustainable Development Network, yakni jaringan internet yang saling menghubungkan sekitar 400 lembaga yang memiliki peran penting dalam masyarakat Honduras dan memberikan manfaat yang sangat besar bagi negara Honduras.

Apapun bentuknya dari penerapan e-government dan apakah penerapan tersebut dapat berhasil atau malah sebaliknya

mengalami kegagalan, pemerintah negara-negara berkembang memang sudah seharusnya untuk bertindak hati-hati dalam mengadopsi konsep tersebut. Oleh karena itulah kelompok kerja yang disebut dengan "Working Group on E-government in Developing Countries" dalam laporannya yang bertajuk "Roadmap for E-government in The Developing World" (April, 2002) menyarankan agar para pemimpin pemerintah negara-negara berkembang yang hendak mengembangkan dan menerapkan konsep e-government dapat menjawab 10 pertanyaan mendasar tentang konsep tersebut. Pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mengapa pemerintah ingin mewujudkan e-government?
- 2) Apakah pemerintah memiliki visi dan prioritas yang jelas bagi penerapan e-government?
- 3) E-government yang seperti apa yang pemerintah sudah siap terapkan?
- 4) Apakah ada kemauan politik yang memadai untuk melakukan upaya e-government?
- 5) Apakah pemerintah memilih proyek e-government dengan cara yang baik?
- 6) Bagaimana seharusnya pemerintah merencanakan dan memanje proyek e-government?
- 7) Bagaimana pemerintah mengatasi sikap bertahan dari aparat pemerintah terhadap proyek e-government?
- 8) Bagaimana pemerintah akan mengukur dan mengkomunikasikan baik kemajuan ataupun kegagalan proyek e-government ini?
- 9) Hubungan apa yang harus jalin oleh pemerintah dengan sektor swasta?
- 10) Bagaimana e-government dapat meningkatkan partisipasi masyarakat?

Dari sejumlah pertanyaan tersebut, pertanyaan yang paling mendasar adalah pertanyaan pertama, yakni mengapa pemerintah ingin menerapkan e-government? Hal ini patut dipahami benar, mengingat bahwa e-government sebenarnya merupakan sebuah transformasi, sedangkan teknologi hanyalah merupakan alat saja. E-government merupakan suatu transformasi yang membantu masyarakat dan dunia bisnis untuk mendapatkan peluang dan kesempatan baru dalam dunia ekonomi yang berbasis pengetahuan atau knowledge. Oleh karena itu apabila pemerintah tidak mampu mereformasi cara kerjanya, mengelola informasi dan fungsi-fungsi internalnya serta melayani masyarakat dan dunia bisnis, maka penerapan konsep e-government tidak akan memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan. Karena penerapan e-government bukan merupakan suatu hal yang gampang dan murah. Apalagi bagi negara-negara berkembang yang masih memiliki keterbatasan sumber daya, ketergesaan dalam menerapkan konsep ini justru akan menjadi kesalahan yang sangat mahal, baik secara finansial maupun secara politis.

Pertanyaan selanjutnya yang perlu pula dikaji dalam menerapkan e-government adalah apakah pemerintah memiliki visi dan prioritas yang jelas dalam menerapkan e-government? Hal ini perlu dipertanyakan mengingat bahwa konsep e-government dapat mengacu kepada berbagai hal yang berbeda baik dari segi bentuk maupun ukurannya. Oleh karena itu disarankan agar pemerintah negara-negara berkembang harus mampu merumuskan visi dan menyusun prioritas yang jelas dalam menerapkan e-government. Lebih lanjut visi tersebut haruslah dipahami bersama oleh semua stakeholder pemerintah

dan berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak (citizen centerd). Ada berbagai macam alasan dan tujuan yang dapat dirumuskan oleh pemerintah dalam penerapan e-government, misalnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan produktivitas dan efisiensi lembaga-lembaga pemerintah, memperkuat sistem hukum dan penegakkan supremasi hukum atau bahkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintah sehingga e-government dapat saja digunakan sebagai alat untuk memberantas praktek korupsi.

Aspek lain yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan e-government adalah menyangkut pertanyaan e-government seperti apa yang sudah kita siap terapkan? Oleh karena setiap masyarakat di berbagai negara memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda, maka menurut Working Group on E-government in Developing Countries (2002) tidak ada satu model atau standar yang berlaku umum bagi kesiapan untuk menerapkan e-government. Kesiapan suatu pemerintah untuk menerapkan e-government akan tergantung pada sasaran, sektor-sektor tertentu yang dipilih sebagai prioritas, ketersediaan sumber dayanya dan tentu saja kebutuhan masyarakat. Menurut Kelompok Kerja tersebut mengidentifikasi beberapa kondisi yang diperlukan bagi kesiapan penerapan e-government, yaitu sebagai berikut:

- adanya prioritas dan kemauan politik pemerintah
- kesiapan sarana infrastruktur telekomunikasi
- keterhubungan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah pada saat ini
- kondisi sumber daya manusia dalam pemerintahan, seperti jumlah tenaga yang

memiliki ketrampilan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi

- Anggaran yang dimiliki sekarang dan yang diharapkan
- Iklim e-business yang ada termasuk di dalamnya perangkat hukum dan keamanan informasi
- Kesiapan aparat pemerintah untuk berubah, dalam hal ini adalah budaya organisasi yang siap melakukan reformasi dan transformasi sebagaimana yang dituntut dalam e-government

Sementara itu the Economist Intelligence Unit menambahkan satu aspek kesiapan suatu negara dalam menciptakan e-business termasuk dalam menerapkan e-government yaitu kesiapan infrastruktur sosial dan budaya, termasuk di dalamnya kemelekan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut dengan "e-literacy". Ditambahkan pula dalam kesiapan dalam keterhubungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya dipihak pemerintah saja, tapi yang paling penting adalah kemudahan akses bagi setiap orang dan dunia swasta terhadap pelayanan telekomunikasi (telepon), komputer PC dan internet. Apabila negara-negara berkembang, termasuk Indonesia belum memiliki kesiapan tersebut maka hendaknya keinginan untuk segera menerapkan e-government perlu dipertimbangkan dan dikaji lebih matang lagi.

#### *Penutup*

E-government merupakan suatu fenomena yang tampak menjanjikan banyak bagi upaya menstransformasi dan mereformasi pemerintahan di berbagai negara, termasuk barangkali di Indonesia. Kebutuhan akan suatu pemerintahan yang dapat dijalankan

secara elektronis muncul di berbagai negara dilatarbelakangi oleh faktor internal dan eksternal pemerintah. Faktor internal adalah kinerja pemerintah yang ditandai dengan inefisiensi, ketidakefektifan, rendahnya akuntabilitas dan transparansi serta aspek lainnya. Sedangkan faktor eksternal adalah perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkannya secara optimal dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat.

Pemerintah negara-negara berkembang di dalam menerapkan konsep tersebut hendaknya memperhatikan kesiapan negaranya dalam menerapkan konsep tersebut. Kesiapan yang dibutuhkan suatu negara dalam menerapkan e-government antara lain meliputi adanya kemauan dan komitmen politik dari pemerintah untuk menerapkan e-government secara konsisten, kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, keterhubungan dan kemudahan akses masyarakat serta pemerintahan terhadap sarana teknologi informasi dan komunikasi, kemelekan masyarakat terhadap teknologi tersebut, serta ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh pemerintah yang mendukung pelaksanaan e-government. Penerapan e-government oleh karena itu bukan merupakan suatu hal yang mudah dan murah, tapi justru menuntut sumber daya yang cukup mahal, terlebih lagi apabila kemudian pengembangan dan penerapannya mengalami kegagalan. Pada akhirnya dapat menjadi suatu sumber pemborosan yang lebih besar lagi oleh pemerintah. Untuk itulah pemerintah Indonesia apabila ingin mengembangkan

konsep tersebut, akan lebih bijaksana apabila penerapan dan pengembangannya didasari oleh kebutuhan dan kesiapan dari berbagai pihak, baik pemerintah, dunia bisnis maupun masyarakat pada umumnya.

#### *Sumber Bacaan*

- Heeks, Richard. 1998. Information Systems and Public Sector Accountability, Government Working Paper Series, No. 1, <http://idpm.man.ac.uk/idpm/igov1.html>.
- Heeks, Richard. 2001. Building e-Government for Development: A Framework for National and Donor Action, Government Working Paper Series, No. 12, <http://idpm.man.ac.uk/idpm/igov12.html>.
- Heeks, Richard. 2001. Understanding e-Government for Development, Government Working Paper Series, No. 11, <http://idpm.man.ac.uk/idpm/igov11.html>
- Kristiadi, JB. 2002. Electronic Government (Government Online). Seminar Sehari Electronic Government, STIA LAN Ujung Pandang.
- Lembaga Administrasi Negara. 2003. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia: Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Moon, M. Jae. 2002. The evolution of E-government among Municipalities: Rhetoric or Reality? Public Administration Review, July-August, vol. 62.
- The Economist Intelligence Unit Limited and IBM Corporation. 2002. The 2002 e-readiness rankings, <http://worldbank.org>.
- The Working Group on E-Government in The Developing World. 2002. Roadmap For E-Government in the Developing World: 10 Questions E-Government Leaders Should Ask Themselves, <http://worldbank.org>.